



GUBERNUR JAMBI

Jambi, 11 November 2025

Nomor : S-1819 /BPKPD-4.2/XI/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian
Keselarasan Rancangan KUA-PPAS
Tahun Anggaran 2026.

Yth. Bupati Tebo
di-
Tebo

Sehubungan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Pemerintah Provinsi Jambi melakukan penilaian atas kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS Kabupaten dengan KEM PPKF.

Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan hasil penilaian kesesuaian rancangan KUA PPAS Kabupaten Tebo dengan KEM PPKF TA 2026 (terlampir). Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian kesesuaian ini, Pemerintah Kabupaten Tebo melakukan penyempurnaan atas rancangan KUA PPAS yang sedang dilakukan pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Namun dalam hal rancangan KUA PPAS telah mendapatkan kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, hasil penilaian tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Selanjutnya, untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD tahun 2026, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan program-program daerah yang selaras dengan program prioritas nasional dan mempedomani Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan alokasi Transfer ke Daerah TA 2026.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.


GUBERNUR JAMBI
H. AL HARIS

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tebo.
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi.
3. Arsip.

Lampiran

Penyelarasan Narasi KUA

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	- Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; - Peningkatan belanja fungsi ekonomi yang berfokus pada pembangunan kawasan pariwisata ekonomi kreatif Jambi; - Peningkatan alokasi APBD yang berkaitan dengan hilirisasi sawit, hilirisasi kelapa, hilirisasi batubara untuk kebutuhan industri; - Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; - Peningkatan belanja APBD yang mendukung kawasan perkebunan dan kualitas produksi komoditas andalan yang berbasis teknologi - Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	none	- Peningkatan iklim investasi daerah ekonomi hijau,(II-13) - Pengembangan ekosistem pariwisata berbasis alam, pertanian, dan budaya daerah,(II-15) - Meningkatkan upaya hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah SDA dengan memperhatikan upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim,(II-18) - Peningkatan kualitas produk dan pelaku wirausaha /UMKM /ekonomi kreatif /koperasi,(II-13) - Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan,(II-13)	SELARAS	Indikator terkait peningkatan investasi daerah, pengembangan pariwisata ekonomi kreatif, hilirisasi komoditas unggulan daerah, serta penguatan UMKM dan tenaga kerja telah selaras dengan arah kebijakan provinsi sebagaimana tercantum dalam dokumen pembangunan ekonomi hijau, industrialisasi berkelanjutan, dan digitalisasi sektor pertanian. namun, perlu dicantumkan secara lebih tegas porsi <i>earmarking</i> serta pemanfaatan <i>opsen</i> PKB dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan sarana transportasi umum sebagai bentuk konsistensi dengan kebijakan provinsi.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Kesehatan (Indeks Kesehatan)	• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan imunisasi dasar lengkap, persalinan serta penguatan layanan kesehatan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah; • Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.	none	• Meningkatkan efektivitas peran TKD dalam mendukung Prioritas Nasional utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan; (II-18) • Memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah Transfer ke Daerah; (II-18) • Penanganan kesehatan masyarakat, termasuk penurunan angka prevalensi stunting, peningkatan kesehatan keluarga, dan penanganan wabah penyakit; (II-20) dan • Memperkuat sinergi pendanaan DAK dengan belanja K/L dan pendanaan lainnya dengan menerapkan konsep keterpaduan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) serta matching program. (II-19)	SELARAS	Kebijakan Umum Anggaran sudah selaras dengan arah kebijakan, terutama terkait penguatan layanan kesehatan dasar, optimalisasi TKD, peningkatan kapasitas fiskal daerah, earmarking pajak rokok, serta sinergi pendanaan kesehatan. Namun perlu penegasan terkait kontribusi daerah pada target kesehatan nasional (imunisasi, persalinan, stunting) dan tetap mengaitkan sinergi pendanaan (APBD, TKD, DAK) dengan penguatan layanan kesehatan dasar sehingga dukungan daerah semakin terukur dan konsisten dengan kebijakan pusat.

Ketahanan Pangan (Perikanan)	• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penguatan kerja sama antar daerah; dan • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan.	none	• Memperkuat sinergi pendanaan DAK dengan belanja K/L dan pendanaan lainnya dengan menerapkan konsep keterpaduan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) serta matching program. (II-19) • Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat, dan (II-12) • Dukungan program ketahanan pangan dan hewani mencakup sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, hortikultura, dan perikanan. (II-20)	SELARAS	Secara umum, Kabupaten Tebo telah menunjukkan komitmen dalam mendukung arah kebijakan. Untuk itu perlu dipertahankan.
------------------------------	--	------	---	---------	--

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Ketahanan Pangan (Pertanian)	- Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; - Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; - Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian; - Penguatan kerja sama antar daerah; - Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.	none	- Memperkuat sinergi pendanaan DAK dengan belanja K/L dan pendanaan lainnya dengan menerapkan konsep keterpaduan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) serta matching program; (II-19) - Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL serta kelengkapan fasilitas agro complex secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Tebo, di samping menciptakan lapangan kerja; (II-11) - Penguatan ekosistem industrialisasi sektor pertanian; (II-13) - Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat; dan (II-12) - Pemerintah Kabupaten Tebo mendorong peningkatan investasi swasta pada sektor pariwisata dan pertanian untuk mempercepat berkembangnya kedua sektor utama perekonomian daerah tersebut. Dalam rangka peningkatan investasi di sektor pariwisata dan pertanian, didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah Daerah yang ramah investasi, diantaranya kemudahan perizinan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, keringanan tarif pajak/retribusi daerah. (II-17)	SELARAS	Kabupaten Tebo telah menunjukkan komitmen dalam mendukung arah kebijakan penguatan sektor pertanian dan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah. Namun diperlukan penguatan penegasan kebijakan fiskal daerah termasuk penyesuaian tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan secara khusus demi mendorong perluasan kawasan pertanian produktif dan hilirisasi komoditas unggulan.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penjelasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	- Dukungan APBD dalam mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; - Dukungan alokasi belanja infrastruktur pada akseslayanan kesehatan dasar dengan meningkatkan kapasitas puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah, serta mendukung program kesehatan preventif seperti imunisasi dan pemberantasan penyakit menular; - Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar; - Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu; - Dukungan APBD untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sistem mitigasi bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum; - Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	none	- Dukungan peningkatan produktivitas perekonomian dengan fokus permodalan BUMDES, pengembangan kelembagaan ekonomi di desa, termasuk Koperasi Unit Desa (KUD), BUMDES/BUMDES Bersama, dan UMKM; akses perbankan masyarakat desa; akses pemasaran produk dan pelayanan logistik desa; perluasan kesempatan dan lapangan pekerjaan layak melalui peningkatan kegiatan padat karya tunai desa, pengembangan desa wisata, desa digital, dan BUMDES/BUMDES Bersama; diversifikasi kegiatan ekonomi desa produktif, meliputi industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan jasa lainnya; (vii) peningkatan kapasitas masyarakat desa, termasuk SDM BUMDES dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD); peningkatan kerja sama antardesa, termasuk penetapan dan penegasan batas wilayah antardesa untuk meningkatkan kepastian hukum, stabilitas keamanan, dan kondusivitas iklim usaha di desa; - Penanganan kesehatan masyarakat, termasuk penurunan angka prevalensi stunting, peningkatan kesehatan keluarga, dan penanganan wabah penyakit; - Dukungan peningkatan produktivitas perekonomian dengan fokus permodalan BUMDES, pengembangan kelembagaan ekonomi di desa, termasuk Koperasi Unit Desa (KUD), BUMDES/BUMDES Bersama, dan UMKM; akses perbankan masyarakat desa; akses pemasaran produk dan pelayanan logistik desa; perluasan kesempatan dan lapangan pekerjaan layak melalui peningkatan kegiatan padat karya tunai desa, pengembangan desa wisata, desa digital, dan BUMDES/BUMDES Bersama; diversifikasi kegiatan ekonomi desa produktif, meliputi industri	Selaras	Secara umum di dalam arah kebijakan KUA Kabupaten Tebo sudah menunjukkan komitmen dalam mendukung berbagai kegiatan Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM. Komitmen tersebut perlu dipertahankan sekaligus ditingkatkan melalui penguatan yang berkelanjutan dengan memperluas Kerjasama antar desa dan penguatan strategi percepatan penurunan kemiskinan ekstrem secara terukur

			pengolahan, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan jasa lainnya; (vii) peningkatan kapasitas masyarakat desa, termasuk SDM BUMDES dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD); peningkatan kerja sama antardesa, termasuk penetapan dan penegasan batas wilayah antardesa untuk meningkatkan kepastian hukum, stabilitas keamanan, dan kondusivitas iklim usaha di desa; • Mewujudkan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan; • Membangun dan memelihara infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa (gotong royong) meliputi akses air bersih dan sanitasi, revitalisasi rumah tidak layak huni, peningkatan ketahanan iklim, serta mitigasi risiko dan penanggulangan bencana; • Optimalisasi penurunan angka kemiskinan dan percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem menuju nol persen.		
--	--	--	---	--	--

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	- Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; - Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; - Peningkatan kapasitas fiskal daerah denganintensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah; - Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan; - Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; - Melakukan skema sinergi pendanaan dan creativefinancing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	none	Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk pemenuhan Standar Peayanan Minial (SPM) Pendidikan, Kesehatan Pekerjaan Umum, Perumahan, Trantibuminmas, dan Sosial. Pemenuhan Belanja mandatory spending sesuai peraturan Perundang-undangan yang beraku.	SELARAS	Secara umum, arah kebijakan Kabupaten Tebo di dalam KUA telah selaras dengan indikator, khususnya melalui prioritas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan serta pemenuhan mandatory spending sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan komitmen daerah dalam menjaga kualitas layanan dasar pendidikan. Ke depan, komitmen ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan, terutama melalui penguatan strategi pembiayaan dan sinergi pendanaan untuk pengembangan sarana prasarana pendidikan. Selain itu, perlu mendorong inovasi pembelajaran berbasis teknologi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah guna memperkuat keberlanjutan pendanaan sektor pendidikan.